



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEVI ARIKA HAPSARI
2. Jabatan : PRANATA JAMUAN
3. NHK : 140087

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.781.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/72 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/160 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/146 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.494.000.000
4. Tanah Seluas 132 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 237.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/50 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 71 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 463.700.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 146.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.108.604.775**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	5.499.304.775
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.499.304.775

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.